

Laporan Riset

## USULAN DESAIN PARADIGMA PEMBANGUNAN “PERCAYA KEPADA RAKYAT” MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) DI KALIMANTAN UTARA

Yansen T. Padan\*

Bupati Malinau, Kalimantan Utara

### Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 18 Januari 2019

Direvisi 08 Maret 2019

Diterima 22 Maret 2019

Kata Kunci:

Desain

Paradigma

Gerakan

Desa

Membangun

### Abstrak

Setiap Pemerintah Negara di mana pun di dunia pasti punya konsep dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunannya. Proses dan strategi yang dijalankan pada saatnya kemudian akan melahirkan berbagai momen dalam sejarah pembangunan dari bangsa itu. Baik dan buruknya kondisi dan capaian pembangunan dari satu pemerintahan negara atau daerah sangat ditentukan oleh niat yang tertuang di dalam *system* dan strategi yang akan dijalankan. Lumrahnya niat dan cita-cita rakyat dari suatu negara yang berdikari, pada umumnya selalu tersirat dan tersurat di dalam landasan hukum yang mendasari terbentuknya negara itu sendiri.

Ternyata dalam proses tersebut banyak pemerintah negara yang telah berhasil, namun juga banyak yang mengalami kegagalan dalam mewujudkan niat dan cita-cita luhur yang telah mereka sepakati itu. Hal yang menjadi kunci dari penentu keberhasilan mewujudkan niat dan cita-cita luhur dari satu negara, tidak lain terletak pada konsistensi kebijakan serta ketepatan dalam menentukan strategi yang akan dijalankan atau langkah yang diterapkan dalam operasionalisasi dan perwujudannya, guna memberikan solusi itu di Indonesia, muncul usulan Gerdema.

© 2019 Komunitas Studi Desain Indonesia. Diterbitkan oleh An1Image. All rights reserved.

### PENDAHULUAN

Banyak negara yang mengalami kendala dalam prosesnya membangun suatu negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia, walaupun Indonesia memiliki konsepsi kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dijalankan yang kemudian menjadi pengalaman dan goresan sejarah dalam membangun Indonesia sejak Kemerdekaan hingga saat ini.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan jelas di sebutkan ide dasar yang sangat brilian dan kuat menjadi motivasi dan nilai yang melatar belakangi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semangat dan Ide dasar itu tidak hanya bertujuan menyatakan sikap dan tekad bulat untuk bebas dari cengkraman penjajah, kemudian hidup merdeka, tetapi lebih tegas dan konkrit menyatakan komitmennya untuk: Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan Mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna hakiki dari Pencerahan Ide dasar ini bermuara pada Keadilan Sosial, yang bermakna Kemakmuran dan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menilik perjalanan panjang dari sejarah Pembangunan Nasional Indonesia hingga saat ini, cukup banyak melahirkan dan memperlihatkan berbagai fenomena yang disatu sisi membanggakan namun juga memprihatinkan kita. Indonesia merupakan satu dari Negara yang kaya akan ide besar dalam menjalankan

\* Peneliti koresponden: Yansen T. Padan, Bupati Malinau, Kalimantan Utara

kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat kita rasakan melalui proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunannya.

Indonesia memiliki filosofi yang sangat luar biasa kuatnya menyatukan bangsa yang beraneka ragam baik suku bangsa dan budaya, yang mengukir Indonesia dengan indah bagaikan mutiara menghiasi bumi persada Nusantara, dari pulau ke pulau, menyatukan laut dan daratan, tiada taranya menghiasi langit Indonesia bagaikan Pelangi Indah di Langit raya.

Sang Maestro Ideologi Panca Sila namanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia yang mengandung nilai hakiki, riil dan kuat mengikat dan menyatukan Kebangsaan Indonesia. Bahkan menjadi kekaguman bangsa lain di dunia, karena betapa hebatnya mampu menyatukan bangsa yang beragam warna kulit, budaya dan Bahasa dengan sederet kearifan yang sangat kuat berbeda dari pulau ke pulau namun harmonis dalam kesatuan bangsa.

“Pancasila The Best Ideology “memang luar biasa, menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa, menjadi Kekuatan dan Dasar Negara, Pedoman Pembangunan Bangsa. Yang paling monumental bagi bangsa Indonesia adalah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional yang dilandasi dan berpedoman kepada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pola GBHN ini dijalan dengan Konsisten mulai Tahun 1969 sampai pada Tahun 1998. GBHN ini merupakan dokumen strategis dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. Di dalam GBHN ditegaskan kebijakan dasar dan konsepsi strategis di dalam mengoperasionalkan niat dan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia. Kita dapat merasakan dengan jelas refleksi yang kita sebut sebagai keberhasilan dari penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Orde Baru (ORBA).

Selanjutnya perjalanan sejarah Pembangunan nasional kita, kemudian ditandai dengan momentum yang sangat prestisius, yaitu dengan Runtuhnya Orde Baru dan kemudian dimulainya Orde Reformasi.

Mendasari semangat Reformasi yang telah dimulai, maka kemudian Strategi Pembangunan Nasional dilandasi pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pengganti GBHN, yang tepatnya dimulai setelah terpilihnya Presiden Republik Indonesia, yang pertama-tama dilakukan melalui pemilihan secara Langsung Oleh Rakyat.

Sistem ini merupakan Konsepsi Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 sampai Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan Dokumen Perencanaan Nasional untuk Preode 20 Tahun, yang terbagi dalam Tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu dalam rentang waktu Lima Tahun. Fungsi RPJPN pada dasarnya menjadi patokan di dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rentang waktu Lima Tahun sesuai dengan Isu sentral nasional dan kemampuan dana yang dimiliki.

#### **PERBEDAAN KEDUANYA TERLETAK PADA GAYA KONSISTENSINYA**

GBHN terlihat relatif konsisten di dalam menjalankan dan mencapai tujuan secara bertahap, namun RPJPN disesuaikan dengan Isu yang berkembang dan kemampuan anggaran yang dimiliki. Belum lagi teras isu dan pendekatan selalu berubah sesuai dengan Paradigma Pemerintahan yang berjalan.

Di awali pada Era Pemerintahan Presiden Habibie yang kemudian melanjutkan Pemerintahan Soeharto untuk memasuki semangat Reformasi yang penuh perjuangan dalam menumbuh dan membentuk nilai dan budaya Reformasi yang penuh dengan evoria pada lingkungan masyarakat, pada tataran Politik maupun Birokrasi Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang selanjutnya lagi dilaksanakan oleh Presiden Megawati.

Puncak dari buah Gerakan Reformasi yang terus bergulir dan masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan setiap elemen masyarakat dan bangsa, bahkan perpolitikan nasional serta birokrasi Negara dan daerah, terjadi pada Era Pemerintahan Presiden Pilihan Rakyat, yaitu Soesilo Bambang Yudoyono atau SBY.

Berbagai langkah konkrit telah dilakukan dalam menjawab kebutuhan reformasi yang dilakukan hampir pada segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling monumental adalah Terjadinya Boming Otonomi Daerah dengan lahir dan terbentuknya berbagai Daerah Otonomi Baru di seluruh pelosok Indonesia, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru ini membawa konsekuensi terjadinya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada rentang waktu berjalannya Proses Reformasi di segala bidang, konsepsi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pembangunan tetap berorientasi dengan fokus pada Fungsi kelembagaan pemerintahan negara (*Money Follow Function*) yang bergerak melaksanakan tugas pemerintah Negara dalam mensejahterakan rakyat.

Momen spesifik dalam konsepsi Pemerintahan dan pembangunan kembali kita rasakan relatif berbeda dengan model orientasi dan fokusnya, ketika kini kita memasuki semangat Nawacita pada Era Presiden Joko Widodo atau JOKOWI pada Tahun 2014. Perencanaan Pembangunan dari orientasi dan fokus pada fungsi (*Money Follow Function*), kemudian berorientasi pada Program (*Money Follow Program*).

Di mana Perencanaan Pembangunan penekanannya diarahkan kepada Program Prioritas. Tujuannya jelas agar semua kekuatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan harus fokus pada persoalan dasar yang dihadapi rakyat dan daerah. Dari prinsip dasar ini diiharapkan terwujud efisiensi dan efektifitas terhadap segenap kekuatan, dana dan waktu, sehingga memberi energy baru yang besar yang tentu diperlukan dalam menangani persoalan lain yang dihadapi oleh bangsa.

Rakyat belum dapat menilai secara konkrit keberhasilan dari pendekatan Paradigma Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo ini, karena masih sedang berjalan.

Rakyat tidak pasimistis dan apriori terhadap segala upaya yang dilakukan, namun pengalaman panjang sejak kemerdekaan hingga sampai pada saat ini, dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, telah lahir berbagai model dan strategi dan semua telah dijalankan dengan baik, namun dapat pastikan, karena rakyat telah melihat semua hasilnya, sehingga kita wajar berpendapat bahwa upaya dan strategi pemerintah sungguh sangat tidak konsisten.

Semua ide dasar dan besar yang sesungguhnya sangat ideal yang tersirat dan tersurat di dalam Visi, Kebijakan bahkan tertuang dalam strategi Perencanaan, namun tidak memberi hasil sebagaimana yang diharapkan.

Memang dapat kita pastikan bahwa dari Kacamata Penyelenggaraan Pemerintahan baik Rencana Strategis, System dan struktur semuanya dinilai sangat baik “The Best System, The Best Idea, The Best Program, The Best Planning dan the best lainnya”. Tetapi kenapa isu pembangunan kita tidak pernah berubah; Miskin. Tidak berdaya, Menganggur, Sumber Daya Manusia yang terbatas serta problem konetifiti (keterbatasan transportasi).

Menurut pandangan peneliti bahwa salah satu faktor yang memberi indikasi kuat yang menunjukkan keberhasilan proses Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengasn melihat dari

Esensinya yang terus bergeser dengan isu pembangunannya yang terus mengalami perubahan, bertumbuh dan berkembang secara positif dan produktif.

Dari aspek Rencana Strategis kita melihat dan menilainya sungguh sangat baik, namun kenyataannya tidak mampu dijalankan dengan baik, apalagi membawa angin perubahan untuk mengubah banyak hal dalam struktur nilai dalam masyarakat, sebagaimana yang diharapkan.

## MENGAPA

Ada apa? Apa yang salah. Segudang pertanyaan mampu meluncur begitu saja, di kala mencernai situasi yang dihadapi saat ini. Jika melihat situasi riil, maka situasi *finominal* ini tentu menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin harus terjadi.

Secara makro dan Global, warga Indonesia bisa bangga, karena dalam rentang waktu 70 tahunan ini negara sudah mampu membangun dirinya (membangun Badannya bahkan juga jiwanya) menjadi negara yang relatif kuat dengan mengukir berbagai prestasi yang menempatkan dirinya di atas capaian dari negara berkembang lainnya.

Idealnya menghitung keberhasilan sebuah negara dalam membangun negara dan bangsanya membutuhkan waktu sekurangnya 80 Tahun. Namun jika mengamati kondisi global negara ini, maka warga negara Indonesia cukup bangga atas capaian yang telah diperoleh.

Secara Institusi kelembagaan negara ini telah memiliki system yang cukup ideal, demikian juga secara tata kelola hubungan kelembagaan menunjukkan sebuah negara yang berkembang maju dan modern, demikian juga penyelenggaraan demokrasi, sungguh luar biasa, bahkan Indonesia bisa dikatakan serbagai penyelenggara demokrasi terbesar di dunia.

Pemilihan langsung dari Presiden sampai ke Kepala Desa, bahkan sampai kepada Pemilihan Ketua RT. Keadaan ini menunjukkan kepada kita, betapa pembangunan Pemerintahan dan Demokratisasi telah berkembang semakin pesat dan dewasa. Hanya yang tersisa menjadi persoalan bagi kita adalah Sumber Daya Manusia, Sosial Ekonomi dan *Konektifiti* Nasional dan Daerah.

Berbagai program pembangunan telah dijalankan, dan secara fisik dapat dilihat wujud keberhasilannya. Jika

menyimak kondisi Mikro dari berbagai model sosial yang berkembang yang ditemui di seantero pelosok dan pinggiran negeri ini, tentu kita bertanya-tanya tentang Fenomena yang dihadapi.

Peneliti katakan fenomena tidak lain karena kondisi riil dari capaian pembangunan yang dirasakan dan amati saat ini, tidak sepadan dengan kondisi potensi dan modal pembangunan yang dimiliki dengan melimpah ruah.

Sebait kalimat bijak konon yang menggambarkan Indonesia itu luar biasa “*Gemah Ripah Loh Jinawi*” yang bisa berarti “Tenteram dan Makmur serta sangat Subur nya bumi Nusantara tercinta ini”. Demikianlah ungkapan kekagumam yang sudah ada sejak dahulu kala yang menyatakan bahwa negeri tercinta Indonesia ini sudah sangat terkenal akan kesuburannya.

Demikian juga ungkapan syair lagu Kus Plus, yang sungguh tidak lajim menggambarkan Kekayaan dan Kesuburan Alam kita Indonesia ini melalui Lagu yang berjudul “Kolam Susu”, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Bukan lautan hanya kolam susu. kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kautemui. Ikan dan udang menghampiri dirimu”.

“Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

Jikalau syair dan lagu ini mewakili kebenaran, bahwa alam dan Bumi Indonesia tercinta luar biasa seperti itu, maka pastilah semua mendapatkan kenyataan bahwa fenomena yang terjadi di negeri kita menjadi suatu keniscayaan. Namun, sungguh menelangsa hati ini, tercekak tenggorokan karena merasakannya kegalauan Hati, kenapa justru di negeri ini sampai saat ini, masih berbicara tentang kemiskinan.

Pengangguran dan berbagai ketimpangan sosial ekonomi yang menggambarkan fenomena negeri yang digambarkan bagaikan negeri di alam antah berantah. Seyogianya dengan kapital yang luar biasa yang telah dikeluarkan selama 74 Tahun Indonesia Merdeka, tentulah rakyat telah terbebas dari ketidakadilan, ketidakberdayaan dan pasti telah terlepas dari belenggu kemiskinan dan pengangguran.

Sebagai orang yang mendiami Pulau Kalimantan tentu semua juga telah menyaksikan dan turut merasakan dampak dari pola penanganan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat perbatasan, pedalaman dan terpencil, di mana selama ini rakyat hidup. Tujuan pembangunan tentulah bermaksud untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Dan itu sudah pasti, karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk mengubah keadaan yang tertinggal menjadi maju. Bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Sebagai mana mencernai Tujuan Pembangunan Nasional di mana tersurat dan tersirat dengan sangat jelas dan gamblang, bahwa Pembangunan bertujuan untuk: Mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Peneliti sangat merasakan fenomena pembangunan yang terjadi di seantero negeri pada umumnya dan khususnya di daerah pedalaman Kalimantan. Bukan perubahan dan kemajuan yang terjadi, namun kondisi riilnya justru memperlihatkan kehidupan masyarakat yang termarginalkan, akibat dari pola pembangunan yang dilakukan. Sehingga bukan semangat kemajuan yang menghampiri masyarakat, tetapi masyarakatlah yang tertatih-tatih berjuang mengejar untuk menghampiri dan menggapai kemajuan itu sendiri, namun sayang hingga saat ini belum tercapai.

Masyarakat perbatasan dan pedalaman berlomba bermigrasi atau dipindahkan dengan meninggalkan daerah asalnya dengan inisiatif sendiri-sendiri atau berkelompok untuk mencari nafkah di daerah yang relatif mampu menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan demi sebuah kehidupan yang diimpikan, atau mereka dipindahkan dengan sedikit dipaksa melalui program pemerintah.

Muncullah program *Regrouping* Desa, Program *Restleman* Penduduk dengan menampung kelompok masyarakat pedalaman di daerah pinggiran kota agar mudah dibina dan bangun. Namun, sayang program ini menurut peneliti tidak manusiawi dan tidak menuntaskan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Ada satu Ilustrasi yang sering peneliti kemukakan untuk menggambar pola berpikir pemerintah dan para elit kekuasaan dalam melakukan

langkah dan kebijakan pembangunan yang dilakukan selama ini terhadap daerah dan masyarakat Pedalaman, yang peneliti sebut sebagai “filsafat kera”.

“Konon di suatu belantara, tinggallah sekelompok Kera Hutan. Pada satu hari duduklah seekor Kera Jantan di suatu bongkahan batu besar di pinggir lubuk sungai kecil yang jernih melintas di tengah belantara yang amat *virgin* ini. Sambil menikmati sejuknya alam, dengan semilir angin sepoi-sepoi yang bertiup sambil menebar semerbaknya aroma wewangian bunga hutan dan buah-buahan yang renum dan sungguh menimbulkan gairah yang luar biasa bagi si kera jantan ini ...”

“... dengan begitu takjubnya si kera menikmati fenomena alam yang luar biasa, matanya tertuju ke lubuk di bawahnya, dia menatap ikan-ikan yang sedang berenang berseleweran sana-sini seolah tanpa tujuan ...”

“... maka timbullah di dalam benak dan pikiran si kera tentang nasib ikan-ikan itu. Dia merasa kasihan dengan para ikan yang berenang sana-sini dan menjadi jatuh kasihan kepada mereka. Akhirnya si kera mengambil keputusan untuk menolong para ikan, agar mereka juga bisa menikmati anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas alam yang luar biasa ini ...”

“... maka dengan kesungguhan dan ketulusan hati, mulailah si kera beraksi dengan menangkap para ikan-ikan itu satu persatu dan meletakkan mereka di sisinya pada bongkahan batu tempat di mana dia sedang duduk. Sungguh ironis tidak lama kemudian para ikan tergelatak mati satu persatu. Si kera sungguh sangat tidak menyadari bahwa sungai adalah dunianya para ikan, dan mereka hidup dengan kearifan lokal para ikan di sungai-sungai”.

Berbekal rasa impati dan rasa kasihan serta rasa perduli dari si kera justru menimbulkan tindakan yang ceroboh dan salah kaprah sehingga menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan malapetaka bagi para ikan. Sungguh tidak disadarinya, bahwa para ikan hidup dengan sangat *survive* di sungai, Karena air dan sungai adalah dunianya ikan. Jika sekira si kera di ceburkan ke dalam sungai, pasti pada akhirnya si kera pun akan kelelap dan mati di sungai yang dalam. Karena Kera hidup di dunia lepas dengan menghirup udara segar di luar air alamnya.

Demikianlah ilustrasi yang menggambarkan cara berpikir yang selama ini berkembang dan bertumbuh yang dilakukan oleh para elit dan pemerintah yang

memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan pembangunan nasional dan daerah untuk mengubah kehidupan masyarakatnya menjadi maju dan sejahtera.

Sehingga menurut peneliti apa yang terjadi selama ini terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan, lebih kepada “sikap jatuh kasihan”. Perilaku kebijakan hanya menangani persoalan secara *insidensial* saja. Tidak strategis, komprehensif dan fokus pada penanganan persoalan dasar yang dihadapi masyarakat Kalimantan.

*Treatment* yang dilakukan hanya berdampak sesaat dan kadang bermakna politis saja. Sebagai contoh ada berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan menangani kemiskinan nasional, melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS), terhadap semua kebijakan itu peneliti ibaratkan sebagai satu tindakan yang cenderung hanya untuk “memelihara kemiskinan”. Bagaikan program “Membangun irigasi di padang pasir”. Program yang tidak efisien dan efektif, program yang tidak produktif dan tidak berdaya guna.

Banyak hal yang telah dilakukan hanya membuang dan menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya alias mubazir. Persoalan tetap menjadi persoalan yang justru semakin berat dan menjadi tantangan yang semakin sulit untuk ditangani, karena berbagai situasi berkembang dinamis, sehingga mengakumulasi menjadi persoalan baru.

Modernisasi terjadi, namun dalam suasana tradisional yang masih kental dengan mental masyarakat tradisional. Mempertahankan nilai tradisional, namun masyarakat sosial diserbu oleh arus globalisasi yang sangat laju, yang tidak menganal batas ruang tempat, waktu dan kalangan.

Menyadari kenyataan ini, berkecamuk dalam batin, gundah gulana, dan berulang merenung dan bertanya bahwa apa yang salah dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Jika sekiranya langkah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijalankan benar adanya, maka dengan berbagai ragam kekayaan yang kita miliki sebagai modal pembangunan, akan mampu mengubah keadaan rakyat Indonesia yang kita cita-citakan sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, apa kenyataannya isu sentral pembangunan sejak kemerdekaan hingga saat ini, tetaplah isu

kemiskinan, pengangguran, rendahnya sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur.

Albert Einstein mengatakan, “Kita tidak bisa memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir yang sama ketika kita menciptakannya”. Kenyataan ini mengajarkan kepada kita, bahwa manusia harus kreatif, harus berani dan mampu mengubah diri untuk melakukan perubahan, harus berani berpikir keluar dari konteks kebiasaan, berpikir “*Out the Book*”.

Jika melakukan sesuatu dengan mendapatkan hasil tertentu, dan bila kita mengulanginya kembali dengan cara yang sama, maka hasilnya tetap sama. Jadi dalam fakta ini, sikap bijak adalah mengubah dan berubah untuk satu perubahan. Kita harus berani berubah untuk mengubah (*Change to change itself*). Prinsip dasar untuk suatu perubahan adalah komitmen berubah (*Change of Commitment*) dan bergerak maju (*To move on*).

Inilah kenyataan yang harus dicerna dengan baik, yang pada akhirnya mendorong peneliti bertindak dan berpikir berani untuk keluar dari cara berpikir pada umumnya. Ketika menghadapi kenyataan bahwa saat ini, selalu diperhadapkan kenyataan diskusi tentang ketidakberdayaan, kemiskinan, pengangguran dan rakyat sangat *familiar* dengan semuanya, sehingga semuanya menjadi biasa-biasa saja.

Contoh sederhana: Banyak pemerintah daerah senang mendapatkan bantuan untuk orang miskin, tetapi tidak pernah berpikir dan berusaha berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan dan keluar dari masalahnya. Takut berjuang dan berkorban atau malas berpikir?

Dari satu pemerintah kepada pemerintah berikutnya, selalu dengan giat serta penuh rasa kebanggaan melakukan berbagai *treatmen* yang diharapkan dapat mengubah keadaan, namun sesungguhnya tidak pernah berubah dan mengubah. Ibarat “*casing* berubah”, namun isinya tetap tidak pernah berubah. Bagaikan “Ular sawah ganti kulit”, kulitnya baru tetapi tubuhnya dan isinya tetaplah ular sawah itu juga.

Kiasan ini dapat disaksikan ketika dulu terdapat kebijakan Pemberian Beras Miskin (RASKIN) yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu, yang kemudian kini diubah sejak Tahun 2016 menjadi Beras Sejahtera (RASTRA), dengan tetap diberikan kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang di nilai tidak mampu.

Walaupun ada pengelompokan atau pengklasifikasian kualitas beras, tetapi tidak pernah mengubah keadaan masyarakat miskin itu sendiri. Entah sampai kapan, tentu tak seorang pun dapat meramalnya. Cara sedikit berubah, tetapi isi tidak pernah berubah, di mana seharusnya tidak hanya cara, tetapi isi menjadi syarat utama untuk terjadinya perubahan itu terjadi.

Demikian juga adanya fenomena pemerintahan kita yang sesungguhnya tetap cenderung sentralistik, walaupun kita bicara tentang otonomi dan desentralisasi, tetapi kenyataannya roh dan semangat pemerintahan itu tetap bersumber pada pusat kekuasaan, yaitu pemerintah pusat itu sendiri.

Terdapat undang-undang dan banyak aturan yang justru memasung kebebasan berkreasi dan berinovasi dari semua pemerintah daerah, sehingga tidak sejalan dengan niat yang tersurat dan tersirat di dalam maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah pascareformasi sampai saat ini.

Dalam hal ini peneliti tidak bermaksud mengajak untuk memperdebatkan tentang otonomi daerah, tetapi satu hal yang peneliti sampaikan, “Percaya kepada Rakyat sesungguhnya merupakan jawaban yang tepat dalam menjalankan pembangunan nasional maupun daerah, karena kekuatan dalam pembangunan sesungguhnya bersumber pada kedaulatan rakyat”.

Ketika peneliti menjalankan tugas sebagai seorang camat, peneliti mendapatkan kesempatan memahami, mencerna dan merasakan secara langsung dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. Peneliti merasakan pemerintahan yang dijalankan ketika itu, hanyalah suatu simbol dan formalitas saja.

Suatu wujud simbol yang bersifat atributit saja. Pemerintahan berjalan, tetapi tidak untuk rakyat tetapi menunjukkan suatu pemerintahan yang kuat sebagai satu *system* pemerintahan. Jangkauan pemerintahan terasa hanya sebatas kekuasaan pemerintahan dari sebuah negara yang berdaulat karena kemerdekaannya.

Sebatas eksistensinya pemerintah bertindak untuk membangun rakyat, karena memang dia memiliki peran dan kekuatan bertindak karena kekuasaannya. Sangat terasa kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat (*Centralization Authority*). Semuanya ada pada pemerintah pusat (*Powerful*). Pemerintah untuk rakyat kita rasakan hanya merupakan suatu simbol saja. Keadaan ini sangat terasa pada era kekuasaan

pemerintahan orde baru. Masyarakat lebih banyak menjadi objek pembangunan. Moto Pembangunan “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanyalah satu slogan ideal untuk menyenangkan pikiran rakyat.

Ketika itu pemerintah memiliki Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan desa dan Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, namun tidak sepenuhnya mampu mengurai makna hakiki dan strategis dari upaya untuk mengatur dan menata pemerintahan untuk rakyat. Kedua Undang-Undang tersebut cenderung menjadi alat kekuasaan bagi pemerintah Orde Baru.

Pemerintah desa dan daerah dibentuk seragam di seluruh Indonesia (*Uniform Paradigm*), sesuatu yang sesungguhnya amat mustahil, karena keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang luar biasa besarnya dan terbentuk dari ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu.

Kenyataannya kekuasaan terpusat pada pemerintah, rakyat hanya menerima kebijakan Pemerintah (*Top Down*). Memang ada *system* perencanaan yang berproses *Bottom Up*, tetapi esikusnya tetap juga *Top Down*, tetap bertumpu pada keputusan dan kebijakan pemerintah. Masyarakat termarginalkan tidak berdaya dan akhirnya hanya bisa pasrah menerima apa adanya.

Satu hal yang peneliti amati dan rasakan menjadi alasan dari pemerintah untuk bersikap dan bertindak sepihak, sekalipun tidak berucap, adalah, “Bahwa masyarakat belum mampu mengambil tanggung jawab membangun dirinya, karena rendahnya sumber daya manusianya”. Sungguh memprihatinkan, sampai kapan keadaan ini terjadi, tentu semua tidak tahu.

Demikian juga peneliti amat bersyukur, karena mempunyai kesempatan untuk memahami, mencernai dan merasakan dinamika awal berprosesnya reformasi secara langsung ditengah-tengah masyarakat sebagai seorang pamong praja (camat). Bagaimana getar semangat reformasi yang luar biasa derasnya menghantam kemapanan yang melekat dan mengkristal di dalam model, sistem dan mental penyelenggara pemerintahan.

Bagaikan kuda liar yang meronta dan bergerak melepaskan diri dari kekang. Di mana-mana deru dan *euphoria* perubahan terjadi pada semua tingkatan dan elemen (sipil, TNI, POLRI dan berbagai lembaga). Sebagai seorang yang selalu berpikir kritis, kreatif dan

inovatif, peneliti sangat antusias merasakan dan menikmati semangat reformasi ini. Reformasi bergulir bagaikan meteor yang melesat dari angkasa raya menerpa bumi. Secara fondamen merasa bangga dan *legowo* untuk berubah.

Pada substansi perubahan *system* rakyat sudah merasakannya telah terjadi, namun relatif tidak terjadi perubahan pada model nilai, mental dan moral birokrasi, bahkan politik secara menyeluruh.

Pergeseran norma dan terbentuknya struktur nilai sosial, politik dan ekonomi serta institusi kelembagaan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya mampu mengubah dan memenuhi *standard* dan harapan yang ingin dicapai melalui reformasi yang terjadi.

Ada hal menarik yang perlu dicermati, kenapa reformasi tidak sepenuhnya berhasil? Terdapat dua rasio yang coba dipahami dan cernai dengan baik, bahwa pada dasarnya setiap visi dan misi harus ditopang oleh rencana strategis yang meliputi kebijakan strategi, Struktur dan *system*. Kemudian pada sisi yang lain adanya nilai, keyakinan dan karakter. Dari kesatuan ini akan melahirkan proses yang terlihat akan baik.

Fenomena dari strategi, struktur dan *system* pemerintah yang baik, namun kenapa masih kurang maksimal dalam pencapaiannya, bahkan cenderung gagal? Dari kondisi di atas, menurut peneliti ada beberapa aspek yang perlu dicernai, yaitu; Rendahnya kadar kesungguhan dan keyakinan pemerintah sendiri di dalam menjalankan perubahan pada berbagai struktur yang hanya bersifat ideal saja (setengah hati), bahkan tidak terlihat berbagai nilai-nilai hakiki yang justru merupakan kekuatan besar dalam mendorong proses pembangunan itu untuk berjalan dengan lebih baik.

Lemahnya pencapaian pemerintah, juga karena pemerintah tidak memiliki karakter *building* yang baik, walaupun ada tetapi tidak kuat dalam memberi respons dan mendorong terjadinya perubahan pada segala lini dan kalangan. Disimpulkan bahwa strategi, struktur dan *system* beserta sesungguhnya dan keyakinan serta Nilai dan karakter yang baik merupakan kesatuan yang berkolerasi, memiliki koherensi yang kuat dan saling konektivitas dalam menggerakkan semua lini untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pemerintah tidak memiliki aspek-aspek tersebut, oleh karenanya kinerja pemerintah dan daerah tidak

terbangun dengan baik. Tidak saling menopang, sehingga kurang mampu merespons kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat perbatasan dan pedalaman yang jauh dari pusat kemajuan, sehingga sampai kini mereka masih saja termarginalkan.

Bercermin dari berbagai pengalaman dan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rentang membangun Indonesia dengan kondisi riil yang dilihat dan rasakan saat ini, mendorong peneliti mendesain pemikiran, membangun keyakinan dan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi dalam membangun masyarakat bangsa Indonesia.

### **PARADIGMA PEMBANGUNAN PERLU DIUBAH**

Kebijakan dan strategi harus ditetapkan secara konkrit untuk menatakelolakan semua potensi menuju prospektif pembangunan yang mengubah nasib rakyat. Demikianlah motivasi pembangunan yang selanjutnya melahirkan pemikiran usulan desain paradigma pemikiran “Percaya sepenuhnya kepada rakyat”, di mana akumulasi semangatnya dituangkan dalam konsepsi Pembangunan yang peneliti namakan “Gerakan Desa Membangun” (GERDEMA).

Terjadinya suatu gerakan karena adanya kepercayaan penuh yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun desa mereka masing-masing. Pandangan dan tindakan ini sangat sejalan dan justru menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menjalankan prinsip Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Dari keseluruhan klausul pasal dan ayat dari Undang-undang ini pada akhirnya bermuara pada satu kata kunci, yaitu bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara kepentingan rakyat. Apa makna dari menyelenggarakan itu, tidak lain bahwa pemerintah desa bertindak memformulasikan berbagai kebutuhan dan kehendak rakyat ke dalam berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan bersama melalui mekanisme pemerintahan desa yang ada.

Jadi penyelenggaraan pemerintahan desa ini, dalam konteks Pembangunan Malinau tidak lain merupakan paradigma baru pemerintahan daerah berdasarkan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Gerdema merupakan satu gerakan masyarakat membangun desa mereka sendiri, dengan memanfaatkan segenap

kekuatan dan potensi yang dimiliki dengan orientasi pengembangannya disesuaikan dengan karakter potensi dan masalah desa.

Apa yang dilaksanakan dan dihasilkan melalui mekanisme perencanaan desa, itulah yang menjadi dasar utama dari perencanaan pembangunan daerah. Jadi dapat ditegaskan, bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi sentral dari perencanaan pembangunan daerah.

### **FILOSOFI DAN MOTO PEMBANGUNAN DAERAH**

Sebagai wujud memberi penguatan terhadap sikap dan hakikat pembangunan yang akan dilakukan, maka pada dasarnya perlu memiliki roh yang memberi daya dorong di dalam menyatukan segenap kekuatan yang dimiliki agar mampu secara simultan bergerak fokus kepada penanganan persoalan pembangunan yang dihadapi.

Filosofi dan moto pembangunan di Malinau, adalah: “Membangun Malinau dari Desa”. Filosofi yang sekaligus menjadi moto pembangunan ini dimaksudkan, bahwa desa merupakan lokus dan fokus dari setiap gerakan yang dilakukan oleh semua tingkatan pemerintahan.

Mekanisme pembangunan yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah harus berorientasi kepada desa. Pandangan ini berdasarkan asumsi bahwa desa adalah tempat berdomisilinya masyarakat. Berdasarkan data, bahwa terdapat kurang lebih enam puluh tujuh persen masyarakat di Indonesia berada dan berdomisili di desa dan khususnya masyarakat Malinau seluruhnya hidup dan berada di desa.

Dengan orientasi Pembangunan yang fokus ke desa, maka dipastikan penanganan persoalan yang melekat pada keberadaan masyarakat akan dapat di tangani dengan tepat dan baik. Terbangunnya desa dengan baik, maka akan memperlihatkan keberhasilan Pembangunan kabupaten Malinau itu sendiri.

### **MODEL PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU**

Setiap daerah memiliki semangat dalam melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Semangat pembangunan itu dituangkan ke dalam model atau pola pembangunan yang akan dilaksanakan secara konsisten. Untuk menyatukan daya dan semangat pembangunan Malinau, maka berdasarkan keyakinan yang teguh



dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, ditetapkan gerakan desa membangun {GERDEMA} sebagai model pembangunan Kabupaten Malinau.

Model Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) ini berlandaskan pada prinsip percaya sepenuhnya kepada Rakyat. Pengertian Percaya sepenuhnya kepada rakyat ini, dapat dipahami dan dimaknai melalui:

Pertama: Menyerahkan kewenangan dan urusan pemerintahan kepada desa. Kedua: Memberi dana desa sebagai modal dalam melaksanakan Gerakan Desa Membangun, di mana nominal yang sudah pernah diberikan sebesar Rp. 1 (satu) milyar sampai dengan Rp. 3 (tiga) milyar rupiah, sesuai dengan kondisi desa dan Kemampuan Anggaran Daerah

Ketiga: Kebebasan dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa. Makna Kebebasan dalam perencanaan ini, yaitu desa diberi tugas dan kewenangan penuh menyusun rencasna pembangunan yang dilakukan di desa.

Proses Perencanaan ini dimulai dari Menghimpun berbagai masalah di desa, kemudian mengartikulasikannya dan dipetakan sesuai kebutuhan strategis dan selanjutnya ditetapkan skala prioritas dan selanjutnya dipilah sesuai dengan tingkat urgensi dan teknis yang layak untuk dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan kelompok mana yang akan di arahkan untuk dilaksanakan melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dilaksanakan Sektoral/SKPD.

### **MENGENAL TIGA MODEL MANAJEMEN DAERAH**

Guna memahami konteks pembangunan daerah, terdapat tiga model manajemen daerah yang kita pahami, yaitu: Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, dan Manajemen Pelayanan Publik.

Konsep ketiga manajemen ini dapat dicernai melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya tersusunnya APBD setiap daerah secara langsung merefleksikan pelaksanaan Manajemen Pemerintahan, Manajemen Pembangunan dan Manajemen Pelayanan Publik.

Sehingga dengan demikian dalam mengukur akselersasi pembangunan melalui aksesibilitas manajemen daerah, maka penyusunan dan profil APBD menjadi tolok ukur dalam menentukan strategi dan prioritas yang ingin di capai.

Melalui profil APBD ini dapat mencernai prinsip dan strategi serta prioritas pembangunan yang akan dilakukan di setiap satuan kerja perangkat daerah dan desa, yang menggambarkan esensi ketiga manajemen daerah tersebut.

Menekankan fungsi dan tugas satu pemerintah melalui kekuatan aspek manajemen, maka akan mewujudkan pemerintahan yang mampu, mandiri, transparan, bertanggung jawab, berintegritas, profesional.

Melalui pengembangan kemampuan Manajemen ini semua fungsi akan berjalan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta pelaporan.

### **KONSEPSI APBD SEBELUM GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)**

Sesuai dengan prinsip dan refleksi aktifitas yang dilaksanakan oleh kebanyakan daerah selama ini, rakyat dengan jelas masih melihat adanya unsur kepentingan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau yang sering disebut sebagai kuatnya ego sektoral.

Hal ini ditandai dengan adanya monopoli anggaran di mana plafon anggaran terkesan menumpuk pada satu SKPD tertentu, tanpa memerhatikan kebutuhan dan strategis daerah.

Masing-masing SKPD terkesan berebut dan berlomba-lomba dengan berbagai usaha untuk mendapatkan porsi anggaran yang besar bagi kepentingasn melaksanakan kegiatannya.

Kadaan ini pun semakin diperparah lagi dengan keterlibat unsur politis dari *stakeholder* daerah lainnya untuk berjuang mendapatkan porsi anggaran tertentu dengan alasan memperjuangkan Aspirasi dari masyarakat (JARING ASMARAs).

Proses ini menggambarkan secara tegas bahwa Pembangunan sudah mengabaikan prinsip anggaran berbasis kinerja dan prinsip berlandaskan pada kebutuhan strategis dan skala prioritas. Dengan kondisi

yang demikian ini dengan sendirinya sudah tidak lagi mencerminkan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pada visi dan misi daerah.

Model pembangunan yang tidak konsisten pada visi dan misi ini, sangat merugikan pimpinan daerah dan masyarakat sendiri. Karena kebijakan yang diambil sudah tidak sesuai lagi dengan yang janjikan pemerintah kepada masyarakat, di mana janji itulah yang menjadi alasan utama masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Untuk memahami kondisi yang penulis uraikan di atas, dapat mencernainya melalui gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Konsep APBD sebelum Gerdema

Pada gambar di atas dapat dilihat SKPD sebagai satuan teknis daerah berada dalam blok atau kamar masing-masing.

Dari Gambar tersebut juga dapat kita diprediksi bahwa hubungan kerja antar satuan teknis daerah sudah pasti tidak dapat berjalan secara harmonis dan taktis, karena dibatasi oleh blokade sektoral. Sebagai perangkat penggerak pembangunan daerah daya dorongnya pasti tidak maksimal, sehingga dengan demikian capaian pun sudah pasti jauh dari harapan. Kenyataan inilah sesungguhnya yang dirasakan saat ini. Di mana dapat disaksikan kondisi riil dari masyarakat hingga saat ini tetap tidak berdaya, dan masih terdapat adanya penduduk miskin dan menganggur.

Jadi tergambarlah pemerintah tidak fokus dan orientasi pada upaya penanganan persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Di antara satuan teknis daerah tidak mampu membangun kerjasama dalam menangani persoalan daerah. Visi dan misi daerah tidak terapkan dengan jelas, tegas dan baik oleh satuan teknis daerah.

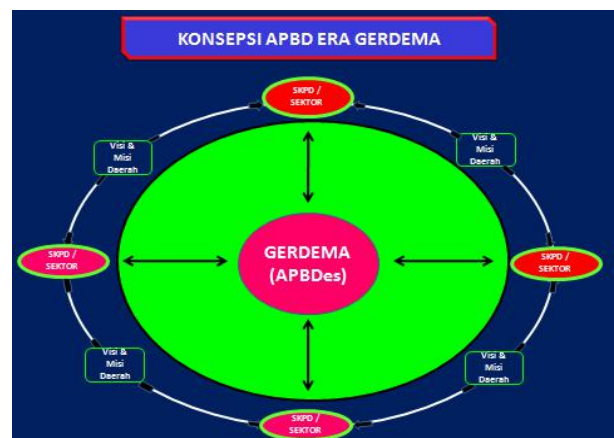
**KONSEPSI APBD SETELAH GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)**

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa model gerakan desa membangun (GERDEMA) adalah model yang sepenuhnya dilandaskan pada sikap percaya sepenuhnya kepada rakyat dan rakyatlah sebagai fokus pembangunan yang dilakukan oleh daerah dan sudah barang tentu itu dilakukan oleh SKPD.

Sehingga dengan demikian, maka semua *energy* daerah melalui SKPD di tujukan kepada desa sebagai lokus pembangunan, semua upaya dikonsentrasikan untuk menggerakkan semua potensi yang ada di desa, sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan karakter dan masalah di desa tersebut.

Sesuai dengan semangat pembangunan yang berorientasi kepada desa sebagai konsepsi membangun Malinau dari desa maka satuan kerja perangkat daerah berkolaborasi secara sinergis, dan menyatukan semangat bersama melaksanakan visi daerah yang menjadi tanggung jawab bersama. Langkah strategis yang dilakukan adalah berdasarkan skala prioritas daerah di desa tertentu yang memiliki karakter, korelasi dan aksesibilitas yang tinggi dalam mewujudkan tujuan dan keberhasilan daerah.

Pada Gambar 2 di bawah ini dapat dipahami dan dicerna dengan baik prospektif pembangunan daerah yang dilakukan secara bersama dan sinergis oleh satuan kerja perangkat daerah. Tergambar kesatuan dan tata hubungan kerja dan tingkat koordinasi yang pasti tinggi terjadi di antara SKPD. Sehingga dengan demikian gerakan langkah pembangunan pasti akan berjalan secara harmonis, daya dorong pasti akan maksimal dan dipastikan capaian pembagunan tentu akan lebih baik, sebagaimana yang diharapkan.



Gambar 2. Konsep APBD era Gerdema

Melalui gambar 2 tersebut dapat dicerna beberapa hal yang sangat *urgent* memperlihatkan model kendali dan *sinergisitas* kerja satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai berikut:

Pertama: Visi dan misi daerah menyatu di dalam visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Kedua: Lokus gerak pembangunan yang dilakukan berada di desa.

Ketiga: Fokus dan orientasi pembangunan dilakukan di desa, melalui mekanisme Gerakan Desa Membangun.

Kelempat: Terjadi hubungan timbal balik diantara sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diantara Desa dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kelima: Plafond dan porsi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan program prioritas, sehingga dengan demikian, tidak semua SKPD memiliki besaran anggaran yang sama.

Prinsip mengutamakan program (*money follow program*) yang digalakkan oleh pemerintah presiden Joko Widodo dalam mengefisienkan dan mengefektifkan dana dan daya yang ada, agar semua program berorientasi dan fokus kepada penanganan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat, telah lebih dulu diterapkan di Kabupaten Malinau.

Awal dalam menerapkan konsepsi Kebijakan yang fokus dan orientasi kepada program prioritas ini, semula mendapat tanggapan yang kurang simpati dan maksimal dari hampir seluruh SKPD.

Bagaimana tidak, dengan dijalankannya kebijakan ini, membawa konsekuensi menurunnya dana yang harus dikelola oleh SKPD tersebut, karena fokus dan orientasi program telah bergeser kepada SKPD yang memiliki program yang korelasi, koherensi dan *konektifitinya* yang lebih kuat, mendalam dan tinggi.

Keenam: Prinsip efisiensi dan efektivitas dan berdaya guna dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Ketujuh: Formulasi kebijakan desa melalui rancangan APBDes menjadi bahan utama dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini sangat mendasar, karena esensi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak lain merupakan kebijakan strategis dalam rangka menangani persoalan utama masyarakat, sebagaimana yang menjadi tujuan

pembangunan itu sendiri, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Logikanya, jika ingin mewujudkan tujuan pembangunan itu, maka tindakan yang dilakukan tidak lain adalah mengelola dan menangani persoalan dasar yang dihadapi oleh rakyat itu sendiri, sebagaimana yang terungkap di dalam rencana kegiatan yang tertuang di dalam setiap dokumen hasil *Pramusrenbang-RT* dan *Musrenbangdes* yang telah mereka laksanakan setiap tahun.

Jadi kesimpulannya masyarakat desa itu sendiri yang lebih memahami dan mengerti dengan masalah utama mereka yang mereka hadapi.

Kedelapan: Asumsi dari Paradigma GERDEMA ini adalah memperbesar gerakan pada tingkat bawah, yaitu gerakan pada situasional masyarakat RT dan Desa.

Dengan Gerakan yang lebih besar pada tingkat bawah, maka kekuatan dan daya dorongnya tentu juga lebih besar dan berdaya guna untuk menyentuh dan mengubah keadaan yang ada secara tepat dan cepat, sebagaimana yang diharapkan.

Ilustrasi: “Rumus Sabun”. Semakin dikocok, busanya semakin menggelembung. Dengan gerakan yang semakin cepat, kuat dan besar, maka semakin membesar gelembungnya.

Demikianlah proses pembangunan yang fokus kepada penanganan masalah pada tataran masyarakat. Dengan memperbesar gerakan langsung di tengah masyarakat, maka akan semakin cepat penanganan masalah, maka hasilnya semakin lebih baik dan semakin kuat sentuhannya, maka akan semakin cepat terjadi perubahannya, dan semakin besar gerak yang dilakukan maka semakin sempurna capaian hasilnya.

Kesembilan: Dipandang dari asumsi kekuasaan. Prinsip GERDEMA adalah menyerahkan urusan dan kewenangan kepada desa (Percaya kepada Rakyat).

Makna hakikinya adalah berbagi kewenangan dan kekuasaan untuk bersama melaksanakan tugas pembangunan (*Distribution of Authority, Power Sharing*).

Bagi sebagian orang atau pemimpin berbagi ini, merupakan sesuatu yang kurang menyenangkan apalagi itu suatu kekuasaan.

Demikianlah halnya dengan paradigma GERDEMA yang mempunyai prinsip percaya kepada rakyat yang dipresentasikan ke dalam tekad berbagi kewenangan untuk menjalankan bersama-sama kekuasaan membangun masyarakat melalui program GERDEMA.

Keuntungan berbagi kewenangan dan kekuasaan ini, tidak hanya mewujudkan keadilan bagi rakyat atau desa, tetapi juga akan melahirkan kekuatan pembangunan melalui kepemimpinan yang terus bertumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Keadaan yang seperti inilah yang tidak disadari oleh pemerintah terutama para elite kekuasaan. Pemerintah cenderung takut kehilangan kekuasaan, karena sebagian telah dibagi.

Hal yang berlaku sama, dicernai dengan logika busa sabun, dengan semakin terjadinya gerakan yang membesar dan menaikkan busa sabun, maka ibarat busa yang semakin tinggi menandai suatu tanggung jawab yang semakin besar, maka akan semakin mendorong ke atas pada posisi pimpinan, yang pada akhirnya menciptakan peluang dan kekuatan baru dari kewenangan dan kekuasaan pimpinan yang tulus dan ikhlas berbagi kepada rakyatnya atau bawahannya. Faktor kekuasaan itu tidak akan pernah habis dan memudar.

Jadi bisa dipahami bahwa inti kekuatan dari suatu kekuasaan adalah ketulusan, keikhlasan, kejujuran dan komitmen. Dengan semakin tinggi, besar dan mendalamnya keempat unsur ini dijalankan, maka akan semakin memperkuat basis kepemimpinan seseorang dengan kekuasaan yang tidak luntur karena hujan dan lekang karena panas, lestari sepanjang masa.

#### **PELAKSANAAN MODEL GERAKAN DESA MEMBANGUN DENGAN LOKUS RUKUN TETANGGA**

Setelah melaksanakan program pembangunan lima tahun Kabupaten Malinau melalui model Gerakan Desa Membangun, peneliti menyadari dan menemukan beberapa hal sebagai kelemahan pelaksanaan Gerakan Desa Membangun sebagai konsep pembangunan yang percaya kepada rakyat.

Diketahui terdapat beberapa nilai dasar dari model pembangunan yang percaya kepada masyarakat, yaitu:

Pertama: Nilai partisipasi masyarakat, dalam pembangunan pemerintah selalu menekankan dan mendorong adanya partisipasi dari masyarakat.

Kedua: Masyarakat yang lebih memahami konteks masalah yang mereka hadapi.

Ketiga: Nilai gotong royong, nilai swadaya yang mengindikasikan nilai individual yang tumbuh dalam komunitas masyarakat sebagai kekuatan pembangunan dan mencirikan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Keempat: Nilai musyawarah masyarakat dalam konteks demokrasi Pancasila yang melandasi demokrasi yang bertumbuh di masyarakat Indonesia.

Kelima: Operasionalisasi pemerintahan desa bertujuan menangani dan mengelola kepentingan masyarakat melalui tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam perjalanan gerakan desa membangun dengan berbagai situasi kondisi yang menunjukkan keunggulan terutama terdapatnya kelemahan dari pemerintahan desa, sehingga tidak sepenuhnya mampu mengelola pembangunan desa berdasarkan nilai-nilai yang saya ungkapkan di atas.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan ideal dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya melalui Model Gerakan Desa Membangun agar benar-benar dapat tercapai dengan baik, maka memasuki periode kedua kepemimpinan peneliti sebagai Bupati Malinau 2016 - 2021, Model Gerakan Desa Membangun lebih peneliti tingkatkan dan dipertajam melalui Tiga Program Utama dengan lokus pembangunan pada wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai instrumen dan sel terkecil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konsep Model Gerakan Desa Membangun yang dipertajam, maka posisi RT merupakan presentasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan berjalannya aktifitas RT dalam menjalankan program yang ditetapkan, maka menunjukkan dan memperlihatkan model penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.

Jika ada keberhasilan dari program pembangunan di tingkat RT, maka hal ini menunjukkan dan memperlihatkan keberhasilan suatu desa dalam membangun rakyatnya.

Bahkan keberhasilan pembangunan daerah menunjukkan dan memperlihatkan Keberhasilan pembangunan di setiap Rukun Tetangga (RT).

Keberhasilan daerah yang diukur dari keberhasilan RT tidak lain, karena pada dasarnya konsep Perencanaan Daerah itu bersumber pada hasil perencanaan di tingkat RT, yang dilakukan melalui mekanisme Pra-Musrenbang RT, sebelum perencanaan desa yaitu Musrenbangdes dilaksanakan.

Asumsi dasar RT sebagai orientasi, lokus dan fokus pembangunan bermaksud, agar pembangunan itu menyentuh secara langsung dan mendasar pada kepentingan rakyat.

Jika berbicara tentang kesejahteraan rakyat, maka pembangunan yang dilaksanakan, harus benar-benar tertuju kepada rakyat yang berada di setiap RT. Sehingga dengan demikian, jika konsep pembangunan RT ini berjalan dengan sebaik-baiknya, maka tidak seorang pun dari masyarakat yang akan terabaikan, yang tidak tersentuh dan tidak menikmati pembangunan yang di laksanakan bersama.

Terdapat beberapa nilai yang menunjukan keunggulan dari konsep RT sebagai orientasi, lokus dan fokus pembangunan, yaitu:

1. Warga RT secara langsung membedah dan memetakan permasalahan yang ada di RT dan melaksanakannya melalui program prioritas yang telah ditetapkan oleh warga RT, sehingga mereka merasakan secara langsung hasil pembangunan yang mereka lakukan sendiri.
2. Kepada RT, diberi dana untuk operasional dan dana untuk menjalankan Program Prioritas RT.
3. Hasil Perencanaan RT, melalui Pra-Musrenbang RT menjadi Dokumen Resmi dari Perencanaan Desa dan Perencanaan Daerah.
4. Terbangun, terbentuk dan tumbuhnya kembali nilai-nilai luhur yang merupakan model kehidupan bangsa Indonesia dari dahulu kala, seperti; gotong royong, toleransi, musyawarah, partisipasi, dan swadaya

## **GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) MENJADI MODEL NASIONAL**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu segala daya dikerahkan melalui mekanisme dan model yang ideal untuk menyatukan semua unsur kekuatan yang dimiliki.

Rakyat sudah merasakan dampak dari model dan strategi yang telah dijalankan, harus diakui bahwa perjalanan panjang dalam pembangunan tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan bangsa secara menyeluruh.

Jika kita mengukur berdasarkan tingkat kesejahteraan, kemiskinan dan Pengangguran dan kesempatan kerja, serta berbagai problem bangsa kita seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi baik darat, udara dan sungai, bahkan penyebaran informasi yang sangat rendah, maka semua seharusnya mengintrospeksi diri dan mencernai serta mengkaji berbagai instrument yang telah dijalankan, yang menghasilkan berbagai situasi dari capaian pembangunan yang ada saat ini.

Berbagai catatan yang diperoleh dari pelaksanaan konsep dan strategi Paradigma Pembangunan Malinau melalui Gerakan Desa Membangun, yang bisa dinilai sebagai suatu keberhasilan dan yang patut dikedepankan, seperti:

1. Menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun dari 20 % menjadi 9,8 % Tahun 2015
2. Pertumbuhan ekonomi riil yang cukup stabil, dalam situasi ekonomi yang sedang menurun.
3. Tersedianya lapangan pekerjaan dari berbagai sektor desa, karena alokasi Dana Gerdema yang cukup memadai, termasuk dana desa dari APBN.
4. Daya Beli Masyarakat tetap menunjukkan kualitas yang baik, serta perkembangan Tabungan Masyarakat yang tetap meningkat.
5. Terbangunnya sarana transportasi jalan tembus antar desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga membuka Isolasi wilayah yang dihadapi oleh Kabupaten Malinau selama ini.
6. Terbangunnya infrastruktur desa di semua ibu kota kecamatan, sehingga menunjukkan kelayakan sebagai ibu kota kecamatan, sekalipun kecamatan berada di daerah perbatasan dan pedalaman.

7. Indeks pembangunan manusia yang tercapai melampaui pencapaian target tiga tahun lebih cepat dari Lima Tahun RPJMD Kabupaten Malinau 2011 – 2016.
8. Terbangunnya media informasi seluler di seluruh kecamatan, perbatasan, dan pedalaman dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat maupun mendukung pelayanan pemerintahan berupa V-SAT yang mempunyai fungsi; telepon, *facsimile*, *Teleconference*, dan surat maya.
9. Terbangunnya jalan tani, sehingga membuka jalur transportasi ke sentra produksi, sehingga dunia pertanian relatif berkembang produktif.
10. Dinamisnya kehidupan sosial dan kondusifnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta bertumbuhnya semangat kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keberagaman suku, agama dan latar belakang. Dengan semangat filosofi pelangi yang mencerminkan Ke-Indonesia-an yang Bhinneka Tunggal Eka.
11. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Di mana Kabupaten Malinau ditetapkan tidak lagi sebagai Daerah Tertinggal.

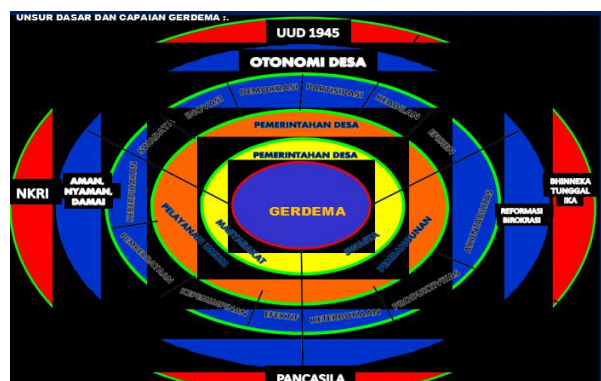
Hal ini tentu disebabkan telah terwujudnya berbagai keberhasilan pembangunan, baik sosial budaya dan ekonomi, informasi, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sektor pemerintahan yang terwujud melalui semangat Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

Dari gambaran capaian di atas, menunjukkan, bahwa Model Gerakan Desa Membangun (GERDEMA), sebagai Paradigma Pembangunan Malinau, telah menunjukkan hasil sesuai dengan konsepsinya.

Sehingga dengan demikian, sebagai suatu konsep yang terbukti mampu menciptakan berbagai perubahan baik pada tatanan wilayah maupun pada aspek kemasyarakatan, tentu wajar dapat menjadi model untuk diterapkan di tempat atau daerah lainnya, bahkan secara nasional. Karena Prospektif Model GERDEMA ini, sudah mengindikasikan tujuan yang ingin dicapai oleh lahirnya Undang-undang nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk memahami konsepsi GERDEMA dan capaiannya sebagai model yang dapat diterapkan secara nasional dapat dicerna melalui unsur dasar dan capaian

GERDEMA di gambar 3 bawah berikut:



Gambar 3

Demikianlah konsepsi Pembangunan Malinau yang dilaksanakan secara Revolusioner melalui Paradigma dan Model Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

Dikatakan revolusioner, karena GERDEMA menuntut adanya perubahan yang fundamental secara desain pemikiran terhadap *instrument* pemerintahan dan pembangunan terutama yang berkenaan dengan keyakinan, komitmen, mental dan karakter serta kemampuan dan kecakapan kerja maupun struktur dan *system* yang harus mampu mengakomodasi, menggerakkan semangat pembangunan dari berbagai pihak; kepada masyarakat, swasta dan setiap penyelenggara pemerintahan sampai ke desa.

Disadari saat ini masih merasakan berbagai situasi yang tentu tidak terasa nyaman dan tidak pada tempatnya sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat pedalaman Kalimantan yang nota bene adalah Masyarakat Dayak, yang merupakan penduduk asli Kalimantan.

Dengan perkembangan pembangunan yang terus terjadi di daerah perkotaan yang pada umumnya di huni oleh saudara-saudara lain yang datang dari berbagai tempat, kehidupan penduduk Masyarakat Dayak terus bergeser dan bergeser tenggelam dalam ketidakberdayaan, termarginalkan oleh kemajuan dengan ketimpangan sosial ekonomi yang terasa tidak berkeadilan.

Dengan pola pembangunan yang terus berjalan, yang tidak menunjukkan *trend* keberpihakan berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan yang sungguh-sungguh kepada masyarakat daerah, menyebabkan Masyarakat Dayak tetap berada pada posisi terpuruk dalam penderitaan dan perjuangan hanya untuk bertahan hidup.

Kepada Masyarakat Dayak tentu tidak ada pilihan lain, harus berjuang untuk juga dapat menikmati manisnya madu kemerdekaan bangsa tercinta. Rakyat Dayak tidak bisa hanya berpangku tangan, merenung dan hanya berkeluh kesah menghadapi situasi ketidaknyamanan ini.

Masyarakat Dayak mempunyai kearifan lokal yang unggul, yaitu Keanekaragaman Budaya Dayak yang berkarakter. Alam dan Lingkungan tempat ditempat hidup *survive* dari dulu kala, masih ada dan syukur masih tersedia walaupun sudah tidak utuh seperti dulu lagi.

Masyarakat Dayak dapat bangkit berjuang menata hidup setara dengan mereka yang telah maju dengan memanfaatkan alam dan lingkungan.

Peneliti katakan “kita”, karena kita sebagai orang Dayak yang tidak pergi ke mana-mana dan tidak akan ke mana-mana. Dengan setia tetap berada di pulau yang penuh dengan Karisma Dayak ini. Tetapi apakah kita tetap berdiam diri dan menerima nasib yang tidak berdaya ini.

Tentu harapan peneliti, Masyarakat Dayak harus percaya diri dan yakin dengan kekuatan daerah yang dimiliki, masyarakat Dayak secara khusus dan masyarakat daerah di mana pun secara umum dapat mengubah keadaan dengan tetap memiliki karakter Budaya yang kokoh kita miliki sebagai orang Dayak atau budaya daerah masing-masing.

Masyarakat daerah harus berubah dalam semangat karakteristik yang sesuai daerah tersebut miliki. Jangan pernah mencoba menjadi yang lain. Bila sebagai seorang Dayak, jadilah sebagai Orang Dayak yang sadar dan bangga sebagai Orang Dayak. Seorang Dayak tidak bisa menjadi orang lain untuk menjadi kuat sebagai Orang Dayak. Orang Dayak bisa kuat menjadi Dayak, dengan segala atribut Kedayakannya, demikian juga suku di Indonesia lainnya, hal ini dapat diterapkan.

Indonersia adalah negara yang menghargai pluralisme. Indonersia memiliki lambang Bhinneka Tunggal Eka. Orang Dayak atau Masyarakat Dayak adalah bagian integral dari Bangsa Indonesia yang merdeka. Orang Dayak memiliki karakter budaya yang berwibawa dan berkharisma, sehingga dia menjadi berbeda dengan budaya nusantara lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat Dayak secara khususnya harus bangga membangun Dayak, tetapi bukan dalam *euphoria* sempit. Masyarakat Dayak harus membangun Dayak untuk duduk sama Rendah dan berdiri sama tinggi.

Warna dan karakter Budaya Dayak harus tegas, transparan dan nyata dalam konfigurasi wujud hidup Bhinneka Tunggal Eka untuk Indonesia yang kekal, lestari sepanjang masa. Orang Dayak tidak boleh sungkan, ragu dan bimbang membangun kehidupannya di Pulau Kalimantan ini dengan semangat kedayakannya.

Peneliti katakan ini, karena tanpa terasa banyak orang Dayak yang secara psikologis seperti merasa tidak lagi memiliki Kalimantan sebagai rumah Orang Dayak. Seperti yang lainnya, Masyarakat Dayak merupakan pemilik yang sah sehingga Masyarakat Dayak harus punya rasa, harus punya niat, punya perilaku dan berani berbuat dan bertanggung jawab untuk membangun Indonersia di Kalimantan ini.

Namun tentu harus disadari dengan bulat dan utuh, bahwa Orang Dayak adalah juga bagian dari Bangsa Indonesia yang hidup bersama dengan saudara sebangsa dan setanah air dengan ragam suku lainnya di Kalimantan ini.

Dengan demikian sebagai satu kesatuan masyarakat yang utuh juga harus sadar bahwa untuk menjadi kuat karena hidup dalam kebersamaan warga bangsa yang lain dan dalam kebersamaan itu pula, semua menjadikan kuat sebagai individu warga negara, masyarakat dan sebagai satu bangsa di Indonesia.

Sikap inilah yang menjadi motivasi, komitmen dan kesadaran peneliti sebagai salah satu Orang Dayak, untuk juga berani berkarya, harus berani berpikir, harus berani berkreasi, harus juga berani berinovasi membangun masyarakat bangsa melalui tugas dan tanggung jawab yang peneliti miliki.

Peneliti berusaha mengejar ketertinggalan dengan belajar sekuat-kuatnya dan setinggi-tingginya. Peneliti membangun sikap berani dan percaya diri untuk berkontribusi dengan berkarya nyata dan berpikiran kritis, kreatif dan inovatif. Peneliti membangun, mendesain gagasan kreatif untuk mengubah pemikiran paradigma pembangunan yang membuat Masyarakat Dayak secara khusus dan masyarakat daerah tertentu yang memiliki masalah yang sama yaitu masyarakat yang tetap termarginalkan di mana pun berada.

Peneliti memberanikan diri berpikir revolusioner mengubah pikiran, mental, budaya dan *system* set yang membuat semua tidak berani berbuat dan membuat banyak orang selalu berpikir umum.

Untuk berubah, harus berani berubah untuk perubahan itu. Rakyat dan pemerintah harus berani berpikir keluar dari cara berpikir umum. Pemerintah harus berani berpikir “*out the box*” dengan sikap berani, jujur, tulus, ikhlas, kerja keras dan berkomitmen memperjuangkannya usulan desain pemikiran tersebut menjadi *system* nilai hidup masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sikap inilah yang kemudian melahirkan Buku Karya Ilmiah Revolusi Dari Desa, sebagai Karya Ilmiah yang pertama dengan Konsep Paradigma Model Gerakan Desa Membangun yang dengan berani dan tegas menyatakan sudah “Saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat, konsep ini telah berhasil mengubah paradigma pembangunan dan telah menorrh berbagai keberhasilan yang cukup signifikan”.

Paradigma dan Model Pembangunan Malinau ini kemudian pada preode kedua Kepemimpinan Malinau dipertajam lagi melalui Strategi Pembangunan yang Berorientasi dan Fokus pada Rukun Tetangga (RT) sebagai Lokusnya, yang dapat kita pahami dan kenal melalui Konsepsi Ilmiah dalam Buku Revolusi RT sebagai Karya Ilmiah kedua dari saya.

Semoga paparan konsep ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dalam mengubah paradigma dan sikap berpikir kita menangani berbagai problem besar dan kecil yang kita hadapi secara individu maupun secara kelompok. terlebih bagi para intelektual, cendikiawan dan para teknokrat Dayak dalam memberi kontribusi bagi pembangunan Masyarakat Bangsa dan Negara.

Yang berharga bukanlah paparan konsep dan gagasan ini, tetapi yang berharga adalah kandungan sikap berani berkreasi dalam kemapanan yang ada. Sikap Berani ini dapat menjadi dorongan dan motivasi serta menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang yang punya harapan (*hope* dan *passion*).

Pemerintah dan rakyat harus tahu, bersama harus bisa melakukannya, dan bersama harus bisa berjuang menjadikannya. “Tahu, bisa, dan jadikan”. Semoga Sukses dan Prestasi mengiringi karya bakti ke depannya.

## REFERENSI

- [1] Padan, Yansen. T. 2017. “Paradigma Pembangunan Percaya Kepada Rakyat”. *Prosiding International Congress 1: Dayak Culture*. Jakarta: AnImage.
- [2] Padan, T, Yansen. 2014. REVOLUSI DARI DESA: Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat. Jakarta: Elex Media.